

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANGGORO MAHENDRA SETYAWAN	tidak ada	tidak ada	Sdr. Anggoro Mahendra S. merupakan Anak Kandung dari Sdr. Djoko Sutrisno; Saudara Kandung dari Sdri. Emy Damayanti Ratnaningsih; dan Keponakan dari Sdr. Haenis Gunarto.
2	SUMANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham di BPR maupun di BPR/ perusahaan lain melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. KARTINI BY PASS KLATEN

Nomor Telepon : 0272329211

Penjelasan Umum : Perkembangan industri perbankan, khususnya BPR yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko BPR. Hal ini penting, mengingat Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada industri perBPRan menjadi kebutuhan yang mendesak pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Dengan semakin ketatnya kompetisi dalam bisnis perBPRan, sehingga risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perBPRan, khususnya BPR akan semakin meningkat. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yang baik merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Selama ini Penerapan prinsip-prinsip ini telah dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten oleh PT BPR Bhakti Riyadi. Tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan BPR dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan usaha PT BPR Bhakti Riyadi dalam memperluas pelayanannya kepada stakeholder, sehingga dapat melayani kebutuhan produk dan jasa perBPRan serta wilayah operasi BPR, menjalin kerjasama dengan mitra sinergis serta peningkatan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perBPRan, BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yang baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	ANGGORO MAHENDRA SETYAWAN	Direktur Utama	Direksi merupakan bagian dari pengelola PT BPR Bhakti Riyadi yang diangkat oleh RUPS dan telah disetujui oleh OJK dan bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR secara profesional dengan mengedepankan prudential BPRing practices serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal BPR. 3. Melaksanakan Tata Kelola Usaha Bagi BPR atau prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Menyusun Visi dan Misi serta program jangka pendek (RBB) dan jangka panjang dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 5. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh BPR secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem recruitment, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi. 6. Tetap menjaga reputasi BPR dengan baik dan sehat diukur dari layanan dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip prudential BPRing practices. 7. Merumuskan business strategy, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko. 8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern (SPI), auditor eksternal, hasil pengawasan dari OJK dan hasil pengawasan otoritas lainnya. 9. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko
2	SUMANTO	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Direksi juga selalu melaksanakan Tata Kelola Bagi BPR (prinsip-prinsip Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Rapat Direksi dilakukan secara intensif bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pembinaan core BPRing system agar laporan dapat disajikan secara akurat, cepat dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK. b. Meningkatkan pelayanan kantor (baik Kantor Pusat dan kantor Kas) yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah menjadi lebih prima. c. Secara bertahap dilakukan review dan pengkinian peraturan dan ketentuan internal berupa Standar Prosedur Operasional, Surat Keputusan dan Edaran Direksi, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta perkembangan lingkungan sehingga akan memudahkan dan mendukung pekerjaan. d. Perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis BPR. e. Melakukan pengajuan calon Komisaris Utama BPR kepada OJK dalam rangka pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Menyusun dan melaksanakan strategi upaya peningkatan realisasi kredit dan laba BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan BPR Indonesia (PBI), dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jumlah anggota Direksi telah sesuai ketentuan yaitu berjumlah 2 (dua) orang untuk BPR dengan Modal Inti di bawah Rp.50 miliar. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR. Sdr. Anggoro Mahendra Setyawan selaku Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Klaten di mana Kantor Pusat BPR berada. Sedangkan Sdr. Sumanto selaku Direktur bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Klaten. Pada waktu penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi tahun 2015 telah mempertimbangkan masukan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Dewan Komisaris. Hal ini penting, karena BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi karena Modal Inti Minimum BPR masih di bawah Rp50 Miliar. Pengangkatan Kembali anggota Direksi melalui RUPSLB tanggal 29 Juni 2020 untuk periode masa jabatan 14 Juli 2020 sampai dengan 14 Juli 2025 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai surat No.S-696/KO.0301/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pengangkatan Kembali Anggota Direksi PT. BPR Bhakti Riyadi. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif BPR. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah sesuai dengan POJK yang mengatur tentang Direksi.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dengan demikian seluruh Direksi PT BPR Bhakti Riyadi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan penilaian uji kelayakan dan kepatutan Direksi oleh OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SYAMSUL MAARIF	Komisaris Utama	Sdr. Syamsul Maarif diangkat sebagai Komisaris Utama melalui RUPSLB tanggal 05 Januari 2022 untuk periode masa jabatan 16 Februari 2022 sampai dengan 16 Februari 2027 berdasarkan akta pernyataan keputusan RUPSLB Nomor 08 tanggal 28-01-2022 perihal pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Sdr. Syamsul Maarif sebagai Komisaris Utama dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK. Sdr. Syamsul Maarif juga merangkap jabatan sebagai komisaris di PT. BPR Antar Rumeksa Artha Karanganyar. Namun hal ini tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
2	SETYA JATI KUSUMA	Komisaris Utama dan Independen	Sdr. Setya Jati Kusuma diangkat kembali sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 19 Juni 2019 untuk periode masa jabatan 7 Juli 2019 sampai dengan 7 Juli 2024 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai surat No.S-651/KO.0301/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Laporan Pengangkatan Dewan Komisaris. Sdr. Setya Jati Kusuma telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan hasil penilaian kepatutan dan kelayakan yang ditetapkan oleh OJK. Sdr. Setya Jati Kusuma tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR atau lembaga keuangan lainnya.

## Rekomendasi Kepada Direksi

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi. Sdr. Syamsul Ma'arif saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, sementara Sdr. Setya Jati Kusuma saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	Koordinator
2	Komite Remunerasi dan Nominasi	Supervisor

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Komite satu	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Program Kerja Komite 1	Realisasi 1	10
2	Komite Remunerasi dan Nominasi	Program Kerja Komite 3	Realisasi 3	10

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANGGORO MAHENDRA SETYAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUMANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	SETYA JATI KUSUMA	325.600.000	10,80
2	SYAMSUL MAARIF	46.600.000	1,54

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemegang saham yang masuk dalam susunan kepengurusan BPR adalah Sdr. Setya Jati Kusuma yang menjabat selaku Komisaris dan Sdr. Syamsul Maarif yang menjabat selaku Komisaris Utama PT BPR Bhakti Riyadi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SETYA JATI KUSUMA	tidak ada	tidak ada	Sdr. Setya Jati Kusuma merupakan Saudara Kandung dari Sdri. Grantika
2	SYAMSUL MAARIF	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemegang saham yang masuk dalam susunan kepengurusan BPR adalah Sdr. Setya Jati Kusuma yang menjabat selaku Komisaris dan Sdr. Syamsul Ma'arif yang menjabat selaku Komisaris Utama PT BPR Bhakti Riyadi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SYAMSUL MAARIF	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SETYA JATI KUSUMA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	314400000	2	157582800
2	Tunjangan	2	81505000	2	11706000
3	Tantiem	1	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	68055813	2	19145400
	Total		463960813		188434200

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,37	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,23	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,99	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,47	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-01-2023	4	Evaluasi kinerja bisnis 2022 , perkembangan Audit laporan keuangan tahunan 2022, pelaksanaan pemberian insentif prestasi, kinerja tahun 2022, kenaikan gaji pegawai 2023
2	22-02-2023	4	Rencana RUPS tahunan, Renc Penyesuaian remunerasi pengurus, rencana pengadaan sepeda motor Inventaris kantor
3	27-03-2023	4	Hasil Pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan tahun buku 2022, Penunjukan AP dan KAP sebagai auditor laporan keuangan tahun buku 2023, rencana pemberian THR
4	18-04-2023	4	Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK 2022, tindak lanjut penunjukan AP dan KAP sebagai auditor LAP Keuangan tahun buku 2023. Penanganan kredit bermasalah
5	08-08-2023	4	Evaluasi kinerja semester 1 2023 , rencana RUPS LB

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	SYAMSUL MAARIF	5	0	100,00
2	SETYA JATI KUSUMA	5	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	1
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Anda	Direksi	Anda	Direksi	Kliring	12.345	keterangan bebas

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 tidak terdapat laporan yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210503	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2021	Yayasan Yatim dan Duafa	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama BPR	: PT BPR Bhakti Riyadi Wedi
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. KARTINI BY PASS KLATEN
Nomor Telepon	: 0272329211
Modal Inti BPR	: 4.274.323.088,00
Total Aset BPR	: 22.145.756.224,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baikstruktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pulamengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya root cause, rencana tindak action plan yang merupakan tindakan korektif corrective action beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,65	0,14	1,29	0.258	Jumlah Direksi 2 orang : 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,95	0,30	1,92	0.288	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama : 1 orang di kota Klaten, dan 1 orang di kota Sukoharjo
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,30	1,70	0.170	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	1,04	0,33	2,27	0.227	Sampai saat ini Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,80	1,10	0,20	3,10	0.310	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	1,08	0,25	2,83	0.283	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,10	1,40	0.105	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	1,00	0,10	2,27	0.170	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,80	0,10	2,40	0.180	Kesimpulan
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi 2 orang : 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama : 1 orang di kota Klaten, dan 1 orang di kota Sukoharjo
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Sampai saat ini Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Keterangan
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Keterangan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Keterangan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keterangan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Keterangan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Keterangan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Keterangan
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Keterangan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Keterangan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Keterangan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Keterangan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Keterangan
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Komisaris 2 orang, jumlah Direksi 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Keterangan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Seluruh anggota Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak merangkap jabatan lebih dari 2 BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Pemegang saham memiliki hubungan keuangan dengan PS lain dan Dekom
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Nasihat dan rekomendasi sebagian telah dilakukan secara tertulis
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Sebagian telah ada bukti tertulis hasil evaluasi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan komisaris tidak memberikan persetujuan kredit kepada debitur yang tidak terkait dengan BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah memantau tindak lanjut hasil temuan audit
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Keterangan

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Dissenting Opinion belum didokumentasikan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Sebagian dokumentasi telah ada hasil pemantauan
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dissenting Opinion belum didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan sisdur benturan kepentingan dan telah diterapkan pada sebagian besar operasionalnya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Apabila ada benturan kepentingan maka pihak-pihak yang terlibat tidak mengambil tindakan/ keputusan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Sebagian telah diterapkan namun belum terdokumentasi dengan baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Memahami namun perlu lebih mendalami ketentuan yang lebih rinci ditingkat pelaksanaan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah menunjuk PE SPI
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE Fsi Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan sebagian pedoman kerja
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Telah dipenuhi ketentuan intern terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab PE Fsi Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Menetapkan langkah2 namun belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Keterangan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Keterangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Sebagian besar ketentuan OJK telah dapat diterapkan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Sudah mulai dilakukan dokumentasi rev &/ pengkinian ketentuan yg dilakukan PE Fsi Kep
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	5	Keterangan

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan kepada Dewan Komisaris belum selengkapnya disampaikan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam periode laporan tidak terdapat kejadian yang memerlukan laporan khusus kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,33	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	4	Sampai saat ini Bank belum mendapatkan kandidat PE Fsi, SPI yang sesuai dengan kualifikasi Bank, Namun Bank telah berkomitmen kepada OJK untuk terus mencari kandidat yang sesuai.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	BPR telah memiliki pedoman kerja dan sisdur namun baru sebagian yang dilakukan pengkinian
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	4	Fungsi SPI untuk saat ini belum terpenuhi.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	4	Ya, sesuai Struktur Organisasi Bank, namun Bank saat ini belum mempunyai PE SPI
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR telah melakukan rekrutmen khusus PE SPI, namun blm mendptkn yg sesuai dengan kualifikasi Bank. Untuk pengembangan SDM fungsi SPI ditujukan kepada Staff SPI
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	3,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR belum menerapkan sepenuhnya, seluruh aspek dan unsur kegiatan

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Tindak lanjut perlu lebih dioptimalkan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan telah disampaikan kepada 3 unsur tersebut oleh staf SPI
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank telah menyampaikan laporan pemberhentian PE SPI

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Komunikasi antara OJK dan KAP telah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Keterangan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Laporan telah disampaikan kepada 3 unsur tersebut
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sesuai ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR menunjuk 1 pegawai yang bertanggung jawab thd penerapan Manajemen Risiko, merangkap jabatan sebagai PE Kepatuhan, Manrisk, APU PPT dan SDM
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Sudah memiliki kebijakan namun untuk penetapan belum
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	Aktivitas baru belum dimiliki
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Kebijakan sudah disusun namun mengevaluasi belum seluruhnya dilakukan

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Belum dilakukan secara optimal, tercermin belum adanya dokumen evaluasi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Identifikasi dan pengukuran serta pemantauan belum rinci dan belum optimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	belum dilakukan secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Belum seluruhnya menerapkan ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Belum menerapkan SIM risiko yang lengkap
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Sosialisasi belum dilakukan untuk seluruh pegawai
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,08	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Keterangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR tidak memiliki aktivitas baru pada periode laporan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Kebijakan sudah disusun namun mengevaluasi belum seluruhnya dilakukan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Sudah sesuai ketentuan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RB jangka panjang belum dijelaskan secara lebih rinci
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Teknologi informasi dalam RB belum dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam mematau pencapaiannya
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penerapan manajemen risiko belum optimal
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Pengawasan belum dituangkan scr tertulis/rutin, sebatas risalah rapat triwulanan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI khususnya lapoaran non keuangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sudah sesuai ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Aspek pengungkapan belum detail
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Perlu lebih dioptimalkan onformasi produk, layanan /atau penggunaan data nasabah
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Perlu lebih disempurnakan khususnya cakupan laporan a.l Data gaji
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Lap sudah ditandatangani pl sedikit oleh 1 anggota Direksi serta disampaikan scr lengkap
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bhakti Riyadi Wedi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# PENUTUP

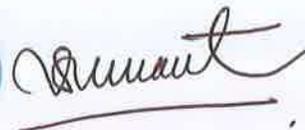
Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Bhakti Riyadi Tahun 2023, dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya

Klaten, 23 Januari 2024

**PT. BPR Perkreditan Rakyat  
Bhakti Riyadi**


Anggoro Mahendra Setyawan  
Direktur Utama



Sumanto  
Direktur yang membawahkan  
Fsi Kepatuhan

## Dewan Komisaris



Syamsul Maarif  
Komisaris Utama



Setya Jati Kusuma  
Komisaris

## KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT*



Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Tata Kelola Bagi BPR (Good Corporate Governance)* posisi akhir Desember 2023 dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut:

### 1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Hasil perhitungan nilai komposit mencapai sebesar 2.02 masih berada pada kisaran nilai komposit  $1.5 \leq \text{nilai komposit} < 2.5$  sehingga predikat komposit adalah "Baik".

### 2. Peringkat masing-masing Faktor

No	Faktor	Peringkat
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.26
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.29
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0.00
4.	Penanganan benturan kepentingan	0.17
5.	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.23
6.	Penerapan fungsi audit intern	0.31
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	0.03
8.	Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern	0.28
9.	Batas maksimum pemberian kredit	0.11
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non-Keuangan BPR, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Eksternal	0.17
11.	Rencana strategis BPR	0.18

### 3. Kelemahan dan Penyebabnya

BPR transparan baik dalam penyampaian informasi ke publik baik kondisi keuangan maupun non keuangan, namun sistem TI masih perlu ditingkatkan lagi kinerjanya.

### 4. Komitmen dan Rencana Tindak

- a. Dengan ini PT BPR Bhakti Riyadi berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Tata Kelola BPR yang Baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

## b. Rencana Tindak

No	Aspek	Rencana Tindak	Waktu Penyelesaian
1	Penerapan fungsi kepatuhan	Meningkatkan <i>compliance awareness</i> dan <i>compliance culture</i> di seluruh tingkatan organisasi	Sepanjang tahun 2023
2	Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal	Meningkatkan fungsi dan peranan SPI dalam operasional BPR. Melaksanakan bisnis bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.	Sepanjang tahun 2023
3	BMPK	Memastikan tidak terjadinya pelanggaran dan atau pelampauan BMPK dan portofolio kredit yang lebih terdiversifikasi.	Sepanjang tahun 2023
4	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Meningkatkan kinerja sistem TI BPR dalam mendukung implementasi tata Kelola yang baik. Meningkatkan peran serta Dewan Komisaris dalam Pengawasan kinerja tata kelola bank.	Sepanjang tahun 2023
5	Rencana strategis BPR	Penyusunan dan penyempurnaan rencana bisnis yang realistis. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana bisnis bank secara berkesinambungan.	Sepanjang tahun 2023



## PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Bhakti Riyadi Tahun 2023, dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya

Klaten, 23 Januari 2024

**PT. BPR Perkreditan Rakyat  
Bhakti Riyadi**

  
**Anggoro Mahendra Setyawan**  
Direktur Utama

**Direksi**  
  
  
**Sumanto**  
Direktur yang membawahkan  
Fsi Kepatuhan

**Dewan Komisaris**

  
**Syamsul Ma'arif**  
Komisaris Utama

  
**Setya Jati Kusuma**  
Komisaris